



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN DELEGASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGHADIRI RANGKAIAN SIDANG WORKING GROUP, EXECUTIVE
COMMITTEE, DAN DRAFTING COMMITTEE SERTA PLENARY SESSIONS
SIDANG TAHUNAN KE-29 ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)

Virtual Meeting dari Seoul, Republic of Korea

8 - 11 November 2021, 17 - 19 November 2021,
dan 13 – 15 Desember 2021

I. PENDAHULUAN

Sidang Tahunan ke-29 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) diselenggarakan secara virtual dari Seoul, Korea Selatan dalam 2 (dua) sesi yaitu rangkaian sidang Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee pada tanggal 8 - 11 November dan 17 - 19 November 2021 serta rangkaian Sidang Pleno pada tanggal 13 - 15 Desember 2021.

Rangkaian Sidang Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee pada tanggal 8-11 November dan 17-19 November 2021 beragendakan pembahasan Draft-draft Resolusi terkait isu-isu Political and Security Matters, Economic and Trade Matters, Regional Cooperation in Asia Pacific region, dan Women Parliamentarians yang diusulkan oleh negara-negara anggota APPF. Adapun rangkaian Sidang Pleno pada tanggal 13-15 Desember 2021 beragendakan penyampaian statement dari masing-masing perwakilan Anggota APPF sesuai agenda item. Hasil pembahasan Draft-draft Resolusi pada masing-masing Working Group yang sudah disepakati pada Drafting Committee akan disampaikan pada Plenary Session APPF pada bulan Desember untuk diadopsi.

Rangkaian Sidang APPF kali ini mengusung tema utama yaitu *The Role of Parliaments in Strengthening Resilience in the post-Covid-19 Era*. dihadiri oleh 22 negara, yaitu, Australia, Fiji, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Kepulauan Marshall, Kolombia, Korea Selatan, Kosta Rika, Laos, Malaysia, Meksiko, Mongolia, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam serta Brunei Darussalam sebagai negara Pengamat.

A. Susunan Delegasi DPR RI

Delegasi DPR RI yang hadir pada Sidang Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee pada tanggal 8-11 November dan 17-19 November 2021 yaitu:

1) Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.	F-PDIP/Anggota Delegasi
2) H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.	F-Golkar/Anggota Delegasi
3) Ir. Effendy Sianipar	F-PDIP/Anggota Delegasi
4) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si	F-PDIP/Anggota Delegasi
5) Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS	F-PDIP/Anggota Delegasi
6) Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si	F-Gerindra/Anggota Delegasi
7) Puteri Anetta Komarudin B.Com	F-Golkar/Anggota Delegasi
8) Heru Widodo, S.Psi	F-PKB/Anggota Delegasi
9) Ratih Megasari Singkaru, M.Sc	F-NasDem/Anggota Delegasi
10) H. Syahrul Aidi Ma'Azaat, Lc., M.A	F-PKS/Anggota Delegasi
11) Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M	FPD/Anggota Delegasi
12) Drs. H. Asman Abnur, S.E.,	F-PAN/Anggota Delegasi

Adapun Delegasi DPR RI yang hadir pada rangkaian Sidang Pleno pada tanggal 13-15 Desember 2021 yaitu:

1) I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M.	F-PDIP/Ketua Delegasi
2) Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P.	F-PKB/Anggota Delegasi
3) Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.	F-Gerindra/Anggota Delegasi
4) Heru Widodo, S.Psi.	F-PKB/Anggota Delegasi
5) Primus Yustisio, S.E., M.A.P.	F-PAN/Anggota Delegasi
6) Linda Megawati, S.E., M.Si.	F-Demokrat/Anggota Delegasi
7) Drs. Fathan	F-PKB/Anggota Delegasi

B. Visi dan Misi Delegasi

Visi Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-29 APPF yaitu:

1. Berpartisipasi aktif dalam Working Group *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) dengan memberikan kontribusi solusi dalam upaya menyelesaikan isu-isu yang menjadi pembahasan berdasarkan prinsip-prinsip universal untuk perdamaian kawasan, kemerdekaan, demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta meningkatkan upaya penguatan parlemen pasca pandemi COVID-19
2. Memperkuat diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong perwujudan kepentingan nasional Indonesia sejalan dengan diplomasi pemerintah Indonesia serta mencapai kesepakatan dalam isu-isu tertentu

Misi Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-29 APPF yaitu:

1. Memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia misalnya: perdamaian kawasan termasuk isu Myanmar serta ketidakstabilan wilayah Timur Tengah, demokrasi, perubahan iklim, penanganan bencana pasca COVID-19, kesetaraan gender serta ekonomi dan perdagangan yang terhubung dengan teknologi digital;
2. Mendorong pembahasan mengenai isu-isu ketidakstabilan negara khususnya Myanmar dan Palestina
3. Mempertegas posisi Indonesia sebagai pemberi solusi dalam setiap Working Group rangkaian sidang tahunan ke-29 APPF
4. Mempererat hubungan dengan negara-negara anggota APPF serta memperdalam dan memperkaya pemahaman terkait fungsi legislasi melalui pertukaran informasi.

C. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Dalam rangka menghadapi rangkaian persidangan Sidang Tahunan ke-29 APPF baik untuk rangkain Sidang Working Group, Executive Committee, dan drafting Committee tanggal 8-11 November dan 17-19 November 2021 maupun untuk rangkaian Plenary Sessions tanggal 13-15 Desember 2021, Sekretariat BKSAP telah melaksanakan persiapan baik dalam hal teknis maupun substansi. Sekretariat bekerjasama dengan Tenaga Ahli BKSAP dan Direktorat Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, menyiapkan usulan draft resolusi sesuai arahan Pimpinan BKSAP dan juga menyiapkan materi delegasi lainnya seperti posisi delegasi, point of intervention, dan statement-statement sesuai agenda item APPF-29.

II. JALANNYA SIDANG

A. Agenda Utama Sidang

Sidang Tahunan ke-29 APPF mengusung tema “The Role of Parliaments in Strengthening Resilience in the Post-COVID-19 Era” dengan agenda utama sebagai berikut:

APPF Women Parliamentarians Meeting

- a. Resolution on Promoting Gender-Sensitive Covid-19 Response and Post-Pandemic Recovery
- b. *Achieving gender equality by increasing women’s participation and representation*

Session 1: Political and Security Matters

- a. *Parliamentary leadership for peace and security in the Asia-Pacific and beyond*
- b. *Strengthening regional multilateralism and addressing issues based on rules*
- c. *Promoting people-centered cooperation by guaranteeing human security*

Session 2: Economic and Trade Matters

- a. *International cooperation for greater economic resilience and inclusive economic recovery*
- b. *Enhancing connectivity and the digital economy*
- c. *The role of parliaments in enhancing economic integration and promoting trade in the region*

Session 3: Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region

- a. *The role of parliaments in balancing disease control, economy, human rights, and ideas for inter-parliamentary cooperation*
- b. *Joint parliamentary action in response to climate change and for sustainable development*
- c. *Improving understanding of cultural diversity in the Asia Pacific*

B. Situasi Umum Persidangan

Rangkaian Sidang Virtual Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee

Rangkaian Sidang virtual Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee dilaksanakan pada tanggal 8-11 dan 17-19 November 2022 dengan mekanisme sebagai berikut:

Working Group on Women Parliamentarians (8 November 2021)

Sidang Working Group of Woman Parliamentarians dilaksanakan pada hari senin 8 November 2021 pukul 17.00 WIB. Persidangan tersebut dihadiri oleh 13 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Meksiko, Rusia, Singapura, Tiongkok, Thailand.

Sidang dipimpin oleh **Hon. Nam In-soon**, Anggota Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea). Chair Hon. Nam In-soon membuka persidangan dengan menjelaskan agenda sidang dan membacakan seluruh judul Draft resolusi yang akan dibahas yaitu 1) *Identifying ways to ensure a gender-sensitive crisis response after the COVID-19 pandemic*; 2) *Achieving gender equality by increasing women's participation and representation*. Pada kesempatan itu, para delegasi dari berbagai negara

dipersilakan untuk memberikan masukan serta intervensinya terhadap draft-draft resolusi tersebut. Sidang diakhiri dengan kesepakatan terhadap kedua Draft Resolusi.

Working Group on Political and Security Matters (8 dan 11 November 2021)

Sidang Working Group 1 (Political and Security Matters) dilaksanakan pada hari senin 8 November 2021 pukul 13.00 WIB. Sidang dihadiri oleh 13 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Meksiko, Rusia, Singapura, Tiongkok, Thailand.

Sidang dipimpin oleh **Hon. Kim Han-jung**, Anggota Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea). Chair Hon. Kim Han-jung membuka persidangan dengan menjelaskan agenda sidang dan membacakan judul seluruh Draft yang akan dibahas yaitu 1) *Parliamentary leadership for peace and security in the Asia-Pacific and beyond*; 2) *Strengthening regional multilateralism and addressing issues based on rules*; 3) *Promoting people-centered cooperation by guaranteeing human security*, serta 2 (dua) topik tambahan yaitu 1) *Peace on the Korean Peninsula* dan 2) *Countering Terrorism and Extremism in the Asia-Pacific Region*.

Pembahasan draft resolusi *Parliamentary leadership for peace and security in the Asia-Pacific and beyond* cukup alot sehingga draft-draft resolusi lainnya akan dilanjutkan pembahasannya dibahas pada tanggal 11 November 2021.

Pada Sidang Working Group tanggal 11 November 2021, Sidang membahas Draft Resolusi *Strengthening regional multilateralism and addressing issues based on rules, Countering terrorism and extremism in the Asia-pacific region*. Dikarenakan pembahasan Draft Reolsusi *Parliamentary leadership for peace and security in the Asia-Pacific and beyond* cukup lama, maka pembahasan draft resolusi selanjutnya disepakati untuk dibahas pada Drafting Committee pada tanggal 17 November 2021.

Working Group on Economic and Trade Matters (9 November 2021)

Sidang Working Group 2 (Economic and Trade Matters) dilaksanakan pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 13.00 WIB. Sidang dihadiri oleh 13 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Meksiko, Rusia, Singapura, Tiongkok, Thailand.

Sidang dipimpin oleh **Hon. Yung Chang-hyun**, Anggota Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea). Chair Hon. Yung Chang-hyun membuka persidangan dengan menjelaskan agenda sidang dan

membacakan judul seluruh Draft yang akan dibahas yaitu 1) *International cooperation for greater economic resilience and inclusive economic recovery*; 2) *Enhancing connectivity and the digital economy*; 3) *The role of parliaments in enhancing economic integration and promoting trade in the region*.

Pembahasan draft resolusi dimulai dari draft *international cooperation for greater economic resilience and inclusive economic recovery*. Pembahasan berlangsung dengan lancar dan dilanjutkan dengan draft berikutnya yaitu, *Enhancing connectivity and the digital economy*. Pada pembahasan ini negara-negara menyampaikan perspektifnya terkait dengan ekonomi digital. Draft terakhir yang dibahas adalah draft resolusi *the role of parliaments in enhancing economic integration and promoting trade in the region*. Chair Hon. Yung Chang-hyun menerima seluruh masukan serta perspektif masing-masing negara dan menutup sidang sesuai dengan agenda.

Working Group on Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region (9 November 2021)

Sidang Working Group 3 (Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region) dilaksanakan pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 08.00 WIB. Sidang dihadiri oleh 13 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Meksiko, Rusia, Singapura, Tiongkok, Thailand.

Sidang dipimpin oleh **Hon. Park Jin**, Anggota Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea). Chair Hon. Park Jin membuka persidangan dengan menjelaskan agenda sidang dan membacakan judul seluruh Draft yang akan dibahas yaitu 1) *The role of parliaments in balancing disease control, economy, human rights, and ideas for inter-parliamentary cooperation*; 2) *Joint parliamentary action in response to climate change and for sustainable development*; 3) *Improving understanding of cultural diversity in the Asia Pacific*.

Pembahasan draft resolusi dimulai dari draft *the role of parliaments in balancing disease control, economy, human rights, and ideas for inter-parliamentary cooperation*. Pembahasan resolusi tersebut berlangsung dengan lancar namun terdapat beberapa poin didalam resolusi yang ditunda terlebih dahulu. Pembahasan dilanjutkan dengan draft berikutnya yaitu, *Joint parliamentary action in response to climate change and for sustainable development*. Pada pembahasan ini negara-negara menyampaikan perspektifnya terkait dengan isu-isu lingkungan serta perubahan iklim. Draft terakhir yang dibahas adalah draft resolusi *Improving understanding of cultural diversity in the Asia Pacific*. Hon. Park Jin menerima seluruh masukan serta perspektif masing-masing negara dan menutup sidang sesuai dengan agenda dan seluruh pembahasan dinyatakan selesai.

Special Meeting of the APPF Executive Committee (10 November 2021)

Sidang Executive Committee diselenggarakan oleh sekretariat Australia pada hari Rabu 10 November 2021. Sidang tersebut dihadiri oleh anggota eksekutif APPF yaitu Korea Selatan sebagai tuan rumah APPF 29, Thailand sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya, Jepang sebagai negara yang ditunjuk oleh Presiden Kehormatan, China sebagai negara perwakilan sub-region Asia timur laut. Indonesia dan Laos sebagai negara perwakilan sub-region Asia tenggara. Australia dan Fiji sebagai negara perwakilan sub-region Oseania, dan Kanada sebagai negara perwakilan sub-region Amerika.

Sidang dibuka oleh Chair **Hon. Tony Smith** dari Parlemen Australia. Sidang Executive Committee APPF memiliki agenda untuk membahas resolusi dari sidang APPF 28 resolusi nomor 19 terkait Presidensi APPF. Selanjutnya **Hon. Park Byeong-seug** dari Parlemen Korea Selatan selaku tuan rumah pelaksanaan sidang tahunan APPF ke-29 memberikan informasi terkait pelaksanaan sidang tersebut. Pembahasan terakhir adalah mengenai status Brunei Darussalam dalam keanggotaan APPF. Pada sidang tersebut disepakati bahwa Presiden APPF akan bertindak juga sebagai tuan rumah pertemuan tahunan APPF dan memiliki masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan Brunei Darussalam diberikan status keanggotaan penuh dalam APPF.

Drafting Committee (17 November 2021)

Sidang Drafting Committee dilaksanakan pada hari Rabu 17 November 2021 pukul 13.00 WIB. Sidang dihadiri oleh 13 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Meksiko, Rusia, Singapura, Tiongkok, Thailand.

Sidang dipimpin oleh **Hon. Hong Ihk-pyo**, Anggota Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea). Chair Hon. Hong Ihk-pyo membuka persidangan dengan menyebutkan draf-draf resolusi yang masih belum disepakati dalam working group sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut yaitu 1) *Strengthening regional multilateralism and addressing issues based on rules (Political and Security Matters)*; 2) *Peace on the Korean Peninsula (Political and Security Matters)*; 3) *Countering Terrorism and Extremism in the Asia-Pacific Region (Political and Security Matters)*; 4) *The role of parliaments in enhancing economic integration and promoting trade in the region (Economic and Trade Matters)*.

Chair Hon. Hong Ihk-pyo mempersilakan para delegasi untuk memberikan posisinya agar dapat didiskusikan untuk mencapai 1 (satu) resolusi yang

disepakati oleh seluruh peserta sidang. Pembahasan berlangsung cukup alot dan dinamis, sampai pada akhir pertemuan masih terdapat 2 (dua) draf resolusi yang belum mencapai kesepakatan yaitu 1) *Strengthening regional multilateralism and addressing issues based on rules (Political and Security Matters)*; dan 4) *The role of parliaments in enhancing economic integration and promoting trade in the region (Economic and Trade Matters)*.

Dikarenakan belum tercapainya keputusan Bersama dalam beberapa resolusi Chair Hon. Hong Ihk-pyo menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada tanggal 19 November 2021. namun dalam berjalannya persidangan masih terdapat beberapa resolusi yang belum mencapai kesepakatan sehingga dijadwalkan kembali pertemuan sidang Drafting Committee ketiga pada tanggal 24 November 2021.

Rangkaian Sidang Virtual Plenary Sessions APPF ke-29

Rangkaian Sidang Virtual Plenary Session yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2022 dibagai dalam beberapa sesi yaitu *Meeting of Women Parliamentarians, First Plenary Session (Political and Security Matters), Second Plenary Session (Economic and Trade Matters), dan Third Plenary Session (Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region)* dengan agenda penyampaian statement dari setiap perwakilan negara anggota APPF serta pembahasan final dan adopsi Draft-draft Resolusi.

Adapun sesi terakhir, *Final Plenary Session* beragendakan *Adoption of Resolutions and Joint Communique, Signature of Joint Communique, dan Closing Ceremony*.

III. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Delegasi DPR RI telah hadir dan berperan aktif dalam setiap sesi rangkaian Sidang Tahunan ke-29 APPF.

Rangkaian Sidang Virtual Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee

Pada Sidang Women Parliamentarians hari senin 8 November 2021 pukul 17.00 WIB, Delegasi DPR RI diwakili oleh **Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si** (F-Gerindra/A-78/Komisi X).

Pada Sidang Women Parliamentarians kali ini Delegasi DPR RI mengusulkan *Draft Resolution on Promoting Gender-Sensitive Covid-19 Response and Post-Pandemic Recovery* dan *Draft Resolution on Achieving Gender Equality By Increasing Women's Participation And Representation*. Delegasi DPR RI mendorong negara-negara Anggota

APPF untuk mengembangkan, menerapkan, dan memperkuat legislasi serta mekanisme kelembagaan yang terkait dengan perlakuan yang sama, akses yang sama terhadap sumber daya, dan partisipasi yang setara untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara setara dan bermakna di semua sektor, termasuk politik, ekonomi, masyarakat, kesehatan dan budaya, tanpa diskriminasi dan kekerasan. Delegasi DPR RI juga menyampaikan mengenai pentingnya kerjasama antar anggota APPF dalam mendorong kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan baik dalam konteks nasional maupun regional.

Selanjutnya, pada Sidang Working Group 1-Political and Security Matters pada hari senin 8 November 2021 pukul 13.00 WIB, Delegasi DPR RI diwakili oleh **Puteri Anetta Komarudin, B. Com** (F-Golkar/A-295/Komisi XI) dan **H. Syahrul Aidi Ma'Azat, Lc., M.A.** (F-PKS/A-418/Komisi V).

Pada Sidang Working Group 1-Political and Security Matters kali ini Delegasi DPR RI mengusulkan *Draft Resolution on Parliamentary Leadership for Peace and Security in the Asia Pacific and Beyond*. Delegasi DPR RI sepakat dengan dimasukkannya isu perubahan iklim sebagai tantangan terbesar bagi keamanan dan perdamaian internasional. Delegasi juga menegaskan isu rasisme, xenophobia, islamophobia dan intoleransi agama maupun nasional juga dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan serta dibutuhkan aksi mendesak di tingkat internasional maupun regional untuk menangani dampak negatif dari ancaman tersebut.

Pada Sidang Working Group 2- Economic and Trade Matters Delegasi pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 13.00 WIB, Delegasi DPR RI yang hadir diwakili oleh **Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.** (F-PDIP/A-249/Komisi IV) dan **Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.** (F-PNasDem/A-402/Komisi X).

Pada Sidang Working Group 2-Economic and Trade Matters kali ini Delegasi DPR RI mengusulkan *Draft Resolution on International Cooperation For Greater Economic Resilience And Inclusive Growth After The Covid-19 Crisis* dan *Draft Resolution On Accelerating Digital Economy And Enhancing Connectivity*. Delegasi DPR RI mendorong diperkuatnya solidaritas dan kerjasama internasional yang intensif dalam kerangka multilateral dan regional untuk menangani pandemi serta dampaknya, berdasarkan nilai inklusifitas, transparansi, keterbukaan, saling menghargai dan menguntungkan. Delegasi DPR RI mendorong penuh langkah ekonomi hijau untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, pembangunan yang lebih cepat dan masyarakat yang lebih inklusif. Delegasi DPR RI menggarisbawahi pentingnya peran digitalisasi, inovasi dan teknologi dalam mempromosikan ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama di masa pandemi, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat UMKM dan akselerasi konektivitas digital di kawasan.

Adapun pada Sidang Working Group 3-Regional Cooperation in Asia-Pacific Region pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 08.00 WIB, Delegasi DPR RI diwakili oleh **Ir. Effendy Sianipar** (F-PDIP/A-144/Komisi IV) **Heru Widodo, S.Psi** (F-PKB/A-55/Komisi III) dan **Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si** (F-PAN/A-492/Komisi VII).

Pada Sidang Working Group 3-Regional Cooperation in Asia-Pacific Region kali ini Delegasi DPR RI mengusulkan *Draft Resolution on Joint Parliamentary Action in Pursuing Response to Climate Change and for Sustainable Development*. Delegasi DPR RI menyerukan agar parlemen menggandakan upayanya dalam mendorong masing-masing negaranya untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup aksi iklim. Delegasi DPR RI juga menyerukan agar parlemen menggandakan upayanya dalam mendorong masing-masing negaranya untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup aksi iklim. Delegasi DPR RI menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dan lokal, serta solusi berbasis alam dan kearifan lokal dalam kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim.

Pada tanggal 10 November 2021 Delegasi DPR RI yang juga anggota Executive Committee APPF menghadiri Sidang Executive Committee untuk membahas amandemen terkait *Rules of Procedure* serta Presidensi dan Sekretariat APPF. Delegasi DPR RI diwakili oleh **Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS** (F-PDIP/A-262/Komisi I) dan **Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.** (F-PD/A-546/Komisi XI).

Delegasi DPR RI berkontribusi dalam sidang Executive Committee dengan mendorong usulan terkait penyelenggaraan sidang tahunan APPF, Tuan rumah parlemen akan menjadi ad-hoc Secretariat dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi serta mendukung pelaksanaan sidang tahunan APPF, selain itu Delegasi DPR RI juga percaya bahwa tanpa sekretariat permanen APPF akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan terkait dengan Presidensi APPF Delegasi DPR RI mengusulkan bahwa periode presiden APPF cukup selama 1 (satu) tahun sejalan dengan kepemimpinan tuan rumah, dan Delegasi DPR RI mendukung penetapan Brunei Darussalam sebagai anggota penuh APPF.

Pada Sidang Drafting Committee tanggal 17 November 2021, Delegasi DPR RI yang hadir diwakili oleh **Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA** (FPDIP/A-139/Komisi XI) dan **H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.** (FPG/A-305/Komisi VI).

Delegasi DPR RI berkontribusi dengan memberikan intervensi terhadap 6 (enam) Draft Resolusi dari seluruh sesi yang telah diagendakan. Delegasi DPR RI juga mengusulkan 2 topik tambahan yaitu, *Situation in Myanmar* dan *Parliamentary support in achieving peaceful coexistence in the Middle East Peace Process*. Namun tidak diakomodir oleh panitia sekretariat APPF-29. Delegasi DPR RI juga turut berperan aktif dalam seluruh rangkaian acara sidang virtual APPF ke-29.

Setelah melaksanakan rangkaian Sidang Virtual Working Group, Executive Committee, dan Drafting Committee di atas, selanjutnya diselenggarakan Sidang Pleno APPF ke-29 pada tanggal 13-15 Desember 2021. Sidang dibagi dalam 5 (lima) sesi yaitu *Meeting of Women Parliamentarians, First Plenary Session (Political and Security Matters), Second Plenary Session (Economic and Trade Matters), Third Plenary Session (Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region)* dan *Final Plenary Session (Adoption of Resolutions and Joint Communiqué, Signature of Joint Communiqué, Closing Ceremony)*.

Sidang Pleno APPF ke 29 dibuka dengan acara *Inaugural Ceremony*, dihadiri oleh I **Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M.** (FPDIP/A-234/Komisi XI). Pada kesempatan ini, berlangsung beberapa agenda acara yaitu *Meeting of Women Parliamentarians, First Plenary Session (Political and Security Matters), Second Plenary Session (Economic and Trade Matters)*, dan *Third Plenary Session (Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region)*, dan *Final Plenary Session* yang memiliki beberapa agenda yaitu *Adoption of Resolutions and Joint Communiqué, Signature of Joint Communiqué*, dan *Closing Ceremony*.

Setelah acara Inaugural Ceremony, dilaksanakan Sidang *Women Parliamentarians* yang dihadiri oleh **Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P** (FPKB/A-32/Komisi IX).

Delegasi DPR RI yang menjadi sponsor kedua Draft Resolusi dari sidang *Women Parliamentarians* menekankan perlunya memastikan semua respon terhadap COVID-19 dan pembuatan keputusan untuk pulih dari COVID-19 dapat memenuhi kebutuhan Perempuan. Oleh karenanya menjadikan pandemi saat ini sebagai momentum untuk membangun inklusi yang lebih kuat bagi perspektif, pengalaman, talent dan bakat yang dimiliki perempuan dalam merespon krisis. Delegasi DPR RI juga menggarisbawahi peran kritical anggota parlemen perempuan dalam merangkul anggota parlemen pria sebagai mitra kerja di Parlemen agar berkomitmen dalam menerapkan respons yang sensitif terhadap isu gender karena kolaborasi antara perempuan dan laki-laki diperlukan dalam mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah dan pulih dari pandemi.

Selanjutnya, dilaksanakan *First Plenary Session* yang diwakili oleh **Drs. Fathan** (FPKB/A-18/Komisi XI) yang berisi agenda penyampaian statement terkait Political dan Security Matters dari masing-masing Delegasi.

Delegasi DPR RI dalam statementnya menegaskan bahwa kerjasama yang didasarkan pada dialog bersama dan rasa saling percaya sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kian kompleks dan dinamis, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi yang tidak terduga, kekurangan pasokan makanan dan kejahatan transnasional. Delegasi DPR RI juga menekankan bahwa parlemen memiliki peran krusial dalam mempengaruhi prioritas

kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan menjaga implementasinya agar tetap dalam koridor. Sebagai pemegang mandat rakyat, parlemen berperan penting dalam menciptakan fondasi demokrasi yang kuat, yang dapat mendorong peningkatan kerjasama multilateral, perdamaian, keamanan dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik.

Pada *Second Plenary Session*, Delegasi DPR RI diwakili oleh **Heru Widodo, S. Psi.** (FPKB/A-55/Komisi III) dan **Primus Yustisio, S.E., M.A.P.** (FPAN/A-498/Komisi VI) dengan agenda penyampaian statement terkait Economic and Trade Matters dari masing-masing Delegasi.

Delegasi DPR RI dalam statementnya menegaskan bahwa penting untuk meningkatkan persatuan, solidaritas dan kerjasama global dalam rangka menjadikan situasi pandemi sebagai momentum untuk mengimplementasikan upaya pemulihan dari covid yang ramah lingkungan. Sehingga dapat mewariskan dunia yang bersih, hijau, sehat, aman dan lebih tangguh bagi generasi mendatang. Delegasi DPR RI juga menekankan bahwa payung hukum legislasi sangat signifikan dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi negara. Parlemen merupakan pemain kunci dalam membangun pemulihan jangka panjang dan berkelanjutan melalui mandat konstitusional legislasi, pengawasan dan penganggaran. Selain itu Delegasi DPR RI turut menggarisbawahi keterkaitan antara akselerasi pengembangan masyarakat digital dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama dan aksi yang terkoordinasi di kawasan dalam tingkat multilateral di bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi (TKI) oleh karenanya menjadi sangat penting.

Pada sesi berikutnya, *Third Plenary Session*, Delegasi DPR RI diwakili oleh **Linda Megawati, S.E., M.Si.** (FPDemokrat/A-545/Komisi VI) dengan agenda penyampaian statement terkait Regional Cooperation in the Asia-Pacific Region dari masing-masing Delegasi.

Delegasi DPR RI melalui statementnya menekankan pentingnya mengambil langkah yang tepat dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Delegasi DPR RI juga menegaskan bahwa Parlemen memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan berkelanjutan agar tetap dapat berada pada jalurnya. Anggota parlemen memainkan peranan utama melalui fungsi legislasi dan penganggaran yang dimiliki, dalam memfasilitasi dan mendukung pencapaian SDGs serta memastikan akuntabilitas eksekutif dalam implementasi SDGs.

Rangkaian Sidang Pleno Tahunan ke-29 APPF diakhiri dengan *Final Plenary Session* yang berisi (tiga) agenda utama yaitu, *Adoption of Resolutions and Joint Communique, Signature of Joint Communique, Closing Ceremony*. Pada kesempatan ini, **I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M.** (FPDIP/A-234/Komisi XI) selaku Ketua Delegasi DPR RI melakukan *e-signing Joint Communique* sebagai hasil Sidang Tahunan tersebut.

IV. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Sidang Tahunan ke-29 APPF telah berhasil menyepakati dan mengadopsi 13 (tiga belas) Resolusi serta menghasilkan Joint Communique yang berisi ringkasan inti tentang seluruh rangkaian persidangan dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua Delegasi.

Adapun 13 (tiga belas) Resolusi yang diadopsi adalah sebagai berikut:

1) *Resolution on Parliamentary Leadership for Peace and Security in the Asia-Pacific and Beyond*

Resolusi ini membahas tentang kepemimpinan parlemen dalam menjaga ketertiban serta kedamaian di wilayah Asia Pasifik. Resolusi tersebut juga menekankan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh parlemen harus sesuai dengan perjanjian serta kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Menekankan bahwa perang nuklir tidak akan menghasilkan pemenang dan hanya menghasilkan kerugian, Memastikan bantuan kemanusiaan di Myanmar serta mendorong terjadinya demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar.

2) *Resolution on Strengthening Regional Multilateralism and Addressing Issues Based on Norms and Rules of International Law*

Resolusi ini menekankan komitmen negara-negara anggota APPF untuk terus bekerjasama dan meningkatkan solidaritas sebagai respon dari tantangan regional seperti pandemi Covid-19, perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan konflik geopolitik.

3) *Resolution on Promoting People-Centered Cooperation by Guaranteeing Human Security*

Resolusi ini mendorong negara-negara APPF untuk melakukan perlindungan terhadap segala ancaman kepada manusia, melakukan kerjasama lintas batas negara untuk menjaga keselamatan manusia, serta berbagi informasi dan teknologi di berbagai sektor termasuk di sektor pangan, kesehatan, dan lingkungan untuk pemulihan kesejahteraan manusia pasca pandemi Covid-19.

4) *Resolution on Peace on the Korean Peninsula*

Resolusi ini membahas terkait situasi di semenanjung Korea, menekankan pentingnya kerjasama regional serta internasional untuk mendorong terjadinya perdamaian di semenanjung Korea serta menegaskan pentingnya upaya denuklirisasi untuk mewujudkan perdamaian dunia.

5) *Resolution on Countering Terrorism and Extremism in the Asia-Pacific Region*

Resolusi ini mendorong negara-negara anggota APPF untuk meningkatkan upaya anti-terorisme dan ekstrimisme, meningkatkan upaya pembentukan hukum dan kerangka kerja terkait anti-terorisme dan ekstrimisme, dan menggunakan diplomasi internasional untuk melakukan promosi agenda anti terorisme.

6) *Resolution on International Cooperation for Greater Economic Resilience and Inclusive Growth after the Covid-19 Crisis*

Resolusi ini mendorong negara-negara anggota APPF untuk berusaha memastikan terciptanya pertumbuhan lapangan kerja dalam implementasi rencana pemulihan pasca pandemi Covid-19. Resolusi ini juga mendorong agar negara-negara APPF mengurangi batasan-batasan regulasi usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) serta meningkatkan akses UMKM terhadap keuangan, teknologi dan jaringan inovasi yang dapat membantu UMKM berkembang dalam ekonomi global.

7) *Resolution on Accelerating Digital Economy and Enhancing Connectivity*

Resolusi ini mendorong negara-negara APPF untuk mempersiapkan infrastruktur serta kebijakan negara terhadap transisi menuju ekonomi digital. Meningkatkan upaya pengembangan keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta bekerjasama untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan ekonomi digital dan membangun sarana pendidikan kompetensi yang relevan.

8) *Resolution on Enhancing Economic Integration and Promoting Trade in the Region*

Resolusi ini membahas tentang kerjasama terbuka antar negara, mendorong negara-negara APPF untuk turut serta dalam perjanjian pasar bebas, memastikan berlanjutnya kebebasan akses pergerakan tenaga kerja esensial, serta mengikutsertakan strategi promosi perdagangan dalam rencana pemulihan nasional pasca pandemi.

9) *Resolution on the Role of Parliaments in Balancing Disease Control, Economy, and Human Rights, and Ideas for Inter-Parliamentary Cooperation*

Resolusi ini membahas tentang penanganan krisis pandemi serta pemulihan ekonomi dan hak asasi manusia. Resolusi tersebut mendorong negara-negara anggota APPF untuk mendedikasikan usaha dalam melindungi hak asasi manusia mengacu kepada hasil-hasil kesepakatan terkait pedoman perlindungan hak asasi manusia. Resolusi ini juga merekomendasikan negara-negara anggota APPF untuk meringankan kebijakan perjalanan antar negara untuk membangkitkan ekonomi.

10) Resolution on Joint Parliamentary Action in Pursuing Response to Climate Change and for Sustainable Development

Resolusi ini membahas dampak perubahan iklim, dimana 85% penduduk dunia telah merasakan dampaknya, yang akan mengarah kepada krisis pangan serta air bersih dan bencana alam. Karenanya, resolusi ini mendorong negara-negara APPF untuk berkolaborasi dalam seluruh lini untuk menguatkan wilayah Asia-Pasifik dalam merespon dampak perubahan iklim secara bersama.

11) Resolution on Improving Understanding of Cultural Diversity in the Asia-Pacific

Resolusi ini menekankan pentingnya upaya melestarikan budaya dan keunikan identitas dari seluruh individu di wilayah Asia-Pasifik. Resolusi ini memberi rekomendasi kepada seluruh negara anggota APPF untuk bekerjasama dengan organisasi internasional, termasuk UNESCO untuk melindungi serta mempromosikan keanekaragaman budaya di wilayah Asia-Pasifik, termasuk dengan dukungan pendanaan serta institusional dalam pengembangan industri kreatif dan pariwisata untuk mengembangkan keanekaragaman budaya.

12) Resolution on Promoting Gender-Sensitive Covid-19 Response and Post-Pandemic Recovery

Resolusi ini mendorong negara-negara anggota APPF untuk mengikutsertakan wanita dalam lembaga penanganan pandemi untuk memberikan perspektif gender secara netral dalam penanganan pandemi. Resolusi ini juga turut menekankan kepada setiap negara untuk memastikan perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita selama masa pandemi.

13) Resolution on Achieving Gender Equality by Increasing Women's Participation and Representation

Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi serta kepemimpinan wanita dalam perkembangan kemanusiaan yang inklusif di wilayah Asia-Pasifik. Resolusi ini mendorong negara-negara anggota APPF untuk mengembangkan kebijakan serta peraturan terkait untuk menciptakan serta memperluas kesempatan untuk wanita dalam peranan tersebut.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- 1) Seluruh pelaksanaan sidang APPF ke-29 berjalan dengan lancar baik dalam sidang Working Group, Executive Committee serta Drafting Committee. Indonesia berperan cukup baik dalam tiap sesi working group dimana anggota delegasi cukup aktif terlibat dalam diskusi membahas masing-masing agenda yaitu *Political and Security, Economy and Trade* serta *Regional Cooperation* dan *Meeting of Women Parliamentarians*
- 2) Pada sidang tahunan APPF ke-29, diskusi berlangsung dinamis antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara seperti Australia, Tiongkok dan Rusia serta tuan rumah Korea Selatan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perspektif yang cukup mencolok diantara negara-negara tersebut terutama terkait pembahasan *Political and Security* terutama mengenai isu Denuklirisasi semenanjung Korea, isu Myanmar, serta terkait upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.
- 3) Sidang ke-29 APPF ditutup dengan agenda penandatanganan *Joint Communique* yang menekankan pentingnya upaya regional untuk mempererat kerjasama dan mendorong upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui kerjasama regional serta peningkatan infrastruktur ekonomi digital. APPF tahun ini menekankan pula pada upaya parlemen dalam mengatasi tantangan-tantangan terkait perubahan iklim dan kekerasan serta ekstrimisme di wilayah Asia-Pasifik.

Saran

- 1) BKSAP DPR RI dapat menyampaikan poin-poin penting dari resolusi-resolusi yang sudah diadopsi kepada Komisi-komisi terkait di DPR sebagai rekomendasi dan tindak lanjut sesuai bidang yang ditangani;
- 2) Mengingat isu-isu pembahasan cukup komprehensif, persiapan dalam pembahasan dan juga pengusulan draf resolusi agar dapat dilakukan lebih matang dan menyesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Tata Tertib APPF sehingga usulan serta topik pembahasan yang ingin Delegasi DPR RI ajukan dapat diakomodir oleh panitia penyelenggara.

VI. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan melakukan perjalanan seluruh kegiatan pertemuan tersebut adalah Rp. 296.347.000 (dua ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- a. *List of Participants*
- b. *Report of Executive Committee*
- c. *Joint Communiqué*
- d. *Resolutions*
- e. *Amended APPF Rules of Procedure*
- f. *Statement Delegasi*
- g. *Dokumentasi Kegiatan*
- h. *Kliping berita*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-29 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* pada tanggal 8 - 11 November 2021 dan 17 - 19 November 2021 secara virtual di Seoul - Korea Selatan.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021

a.n. Delegasi
Ketua Delegasi,



I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M.

A-234